

PANCASILA DI TENGAH INDAHNYA KEANEKARAGAMAN

Oleh:

Nong Hoban

Abstrak

Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di tengah indahnya keanekaragaman. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode (*historical method*). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengumpulkan sumber (*heuristik*), Kedua adalah kritik sumber atau verifikasi, langkah Ketiga adalah interpretasi, langkah Keempat adalah rekonstruksi *historiografi* (penulisan) sejarah. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia artinya Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia di dalam memandang diri dan lingkungannya. Sikap manusia ini dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni iman, cipta, rasa dan karsa, yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup perorangan lainnya menjadi pandangan hidup kelompok. Hubungan antara kehidupan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya melahirkan suatu pandangan hidup bangsa. Praksis budaya yang beranekaragam yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Keberagaman budaya Indonesia menjadi ciri yang melandasi terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari lima agama besar yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, Kongfutzu dan aliran kepercayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Pembauran dalam keberbedaan baik agama, suku, ras, bahasa, adat istiadat saling berinteraksi. Dalam perjalanan sejarah bangsa budaya asli dan filsafat Hindu, Budha, Islam, Kristen berkolaborasi dan kristalisasi tumbulah peradaban luhur bangsa yang walaupun beranekaragam suku bangsa, adat istiadat dan agama tetapi satu. Satu dalam cara pandang melihat keberbedaan maka tumbulah semangat solidaritas dan rasa kesetiakawanan karena cita-cita dan tujuan bersama yang memancarkan sinar sakti persatuan dalam panji ideologi Pancasila.

Kata Kunci: *Pancasila, Indahnya, Keanekaragaman*

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia artinya Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila itu lahir sebagai komitmen bangsa Indonesia untuk menuntun bangsa dan negara Indonesia ke arah terciptanya masyarakat adil dan makmur. Sementara itu, realitas memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Suku bangsa yang tersebar di nusantara ini terdiri dari suku bangsa besar maupun suku bangsa kecil. Suku bangsa besar seperti Jawa,

Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Disamping itu juga terdapat suku bangsa kecil yang menempati pulau-pulau yang tersebar di nusantara. Suku bangsa yang dikalsifikasikan kecil ini ternyata memiliki keunikan budaya dan adat istiadat yang sangat spesifik.

Potensi kekayaan bangsa ini harus dipelihara secara cerdas oleh anak bangsa sebagai modal dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan berenegara merupakan kewajiban anak bangsa sehingga tidak terprovokasi dengan masalah yang bersumber dari luar (dunia globalisasi) maupun masalah dari dalam negeri sehingga terhindar dari konflik dan disintegrasi bangsa.

Secara singkat, situasi pada masa ini menggambarkan situasi antagonisme. Di satu sisi terdapat globalisasi dengan pelbagai efek ekonomi (krisis monoter atau melonjaknya harga minyak dunia misalnya) juga efek politik (liberalisme demokrasi dengan pelbagai persoalannya), dan di sisi lain terdapat pelbagai penolakan keterbukaan global tersebut, dan penegasan-penegasan jati diri, baik berupa kekerasan SARA dan teror juga berdasarkan praktik politik bernuansa primordial dan sektarian.

Pemekaran wilayah sering kali bukannya menjadi persoalan pembagian administrasi pemerintahan, namun sering berubah menjadi identifikasi kelompok primordial. Antagonisme tersebut juga tampak dalam produk hukum yang didesain pada masa Pasca-Soeharto yang di satu sisi mengklaim mewartakan semangat kemanusiaan, namun secara substansial menggambarkan identitas ideologis kelompok tertentu (UU Pornografi, misalnya) (Vox, 2012:33).

Sikap saling menghargai dan menghormati di antara warga bangsa perlu dipupuk dan dilestarikan sehingga kita tetap berada pada satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan yang sama walaupun setiap suku bangsa di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa daerah dan kebudayaan serta adat istiadat dan agamanya masing-masing. Sikap terbuka dan toleransi diantara anak bangsa perlu dijunjung tinggi sehingga tidak ada kecurigaan diantara anak bangsa. Jika tidak diperhatikan dengan baik maka akan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Keanekaragaman yang ada di nusantara bukan tumbuh atau muncul secara kebetulan tetapi, potensi keanekaragaman etnik, budaya dan agama sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Keanekaragaman turut memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap pembentukan bangsa Indonesia. Selanjutnya mari kita kembali melihat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta potret

ke Indonesian meliputi kondisi negara dan bangsa dan segala persoalan yang meliputinya, dengan demikian diharapkan akan didapatkan pula solusi pemecahannya untuk dijadikan pengangan dan diimplementasikan dalam melanjutkan perjalanan sejarah bangsa ke depan.

Moerdiono dkk mengatakan bahwa salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Lebih lanjut Moerdiono pernah menegaskan bahwa kondisi masyarakat sejak permulaan hidup bernegara adalah serba majemuk. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia bersifat multietnis, multi religius, dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang kehidupan masyarakat merupakan mozaik-mozaik indah yang dapat memperkaya khazanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percecokan serta perselisihan. Oleh karena itu, proses hubungan sosial perlu diusahakan agar berjalan secara sentipretal, agar terjadi apa yang menjadi populer dalam tahun-tahun pertama perjuangan: "*samenbundeling van alle Krachten*". Disamping itu kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai lewat revolusi. Penggalan kekuatan tersebut sangat diperlukan untuk membekali bangsa Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajah dan mengusirnya dari bumi nusantara (1992:52).

B. Metodologi Penelitian

Metodologi sejarah adalah prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian, sedangkan metode sejarah adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau. Suatu metode diperlukan dalam penulisan kisah sejarah untuk mendapatkan tulisan sistematis dan obyektif. Untuk mengkaji tulisan ini digunakan metode sejarah. Gottschalk mengatakan metode sejarah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Wikipedia, 2017). Metode sejarah memiliki empat langkah yang harus dilewati. Keempat langkah tersebut diantaranya sebagai berikut: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan ketrampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah/Jurnal, surat kabar, iklan dan

lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Sumber sekunder sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Dalam pencarian sumber sejarah sumber primer harus ditemukan, karena penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber sekunder. Agar pencarian sumber berlangsung secara efektif, dua unsur penunjang *heuristic* harus diperhatikan: (a) Pencarian sumber harus berpedoman pada bibliografi kerja dan kerangka tulisan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang tersirat dalam kerangka tulisan (bab dan sub bab peneliti akan mengetahui sumber-sumber yang belum ditemukan, (b) dalam mencari sumber di perpustakaan peneliti wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan.

2. Kritik Sumber

Dalam konteks kritik sumber, dikenal kritik intern dan kritik eksteren. Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan? Apakah sumber itu asli, turunan atau palsu? Dengan kata lain kritik ekstern menilai keakuratan sumber. Kritik Intern menilai kredibilitas data dalam sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas (sistem kartu) agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Walaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam melakukan penulisan sejarah terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, Pertama, penyeleksian atas fakta-fakta, untaian fakta-fakta, yang dipilihnya berdasarkan dua kriteria: relevansi peristiwa-peristiwa dan kelayakannya. Kedua imajinasi yang digunakan untuk merangkai fakta-fakta yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu hipotesis. Ketiga kronologis (Wikipedia, 2017).

C. Pembahasan

1 Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Secara harfiah Pancasila dijabarkan dalam dua kata, yaitu: *Panca* yang berarti lima, dan *Sila* berarti Dasar atau rangkaian kata tersebut mempunyai makna Lima Dasar. Secara

filosofis mengandung makna yang paling dalam untuk dipedomani oleh bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku di tengah kebhinekaan. Kebhinekaan harus dipandang sebagai suatu kekuatan moral yang perlu dipelihara dan dilestarikan serta suatu komitmen nasional yang secara filosofis memandang sebagai suatu kekuatan yang maha dasyat dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar Negara RI berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan pancasila sebagai dasar Negara RI yang sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat. Mengingat hal itu, meskipun dalam suasana reformasi dan kehidupan demokrasi yang bebas untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya, namun sebaiknya tidak memberikan penafsiran terhadap Pancasila menurut angapan sendiri-sendiri, yaitu dalam arti menafsirkan Pancasila itu dengan menggunakan ukuran lain yang tidak bersumberkan pada sila-sila Pancasila sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan; apalagi menafsirkan pancasila secara lepas/menyimpang dari konteks dasarnya untuk apa Pancasila itu dirumuskan dan digunakan oleh bangsa Indonesia (Marsudi, 2004:8-9).

Pokok pikiran di atas mengisyaratkan kepada komponen bangsa agar tidak serta merta menafsirkan dasar negara yang salah atau mau menggantikan dasar negara Indonesia, Pancasila dengan ideologi lain, yang akan membawa dampak pada terganggunya stabilitas nasional Indonesia, hal ini telah dialami oleh bangsa Indonesia pada perjalanan sejarah bangsa di masa silam, namun Pancasila telah menunjukkan kesaktiannya dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Seperti tahun 1959 perpecahan menimpa badan konstituante, hasil pemilu tahun 1955 perpecahan itu timbul karena partai Masyumi, NU dan pendukungnya mengusulkan Dasar Negara Islam sementara PNI dan partai pendukung lainnya mengusulkan dasar negara Pancasila. Perpecahan ini tidak dapat diatasi bahkan perang saudara mengancam. Dalam keadaan yang demikian dengan dekrit presiden 5 Juli 1959, presiden Soekarno dapat mengatasinya dengan dekrit itu mengembalikan pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Ternyata usaha ini menyelamatkan bangsa Indonesia dari perang saudara. Terakhir tahun 1965, PKI mengadakan manuver untuk meniadakan Pancasila dan mengantikannya dengan paham komunis. Akhirnya dengan surat perintah 11 Maret 1966 Soeharto berhasil menumpas PKI dan pada tahun 1966 itu juga MPRS berhasil mengeluarkan Tap MPRS No XX/MPRS/1966

yang memberi dasar YURIDIS pelaksanaan Pancasila dan UU Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pancasila sebagai pandangan hidup berkenaan dengan sikap manusia di dalam memandang diri dan lingkungannya. Sikap manusia ini dibentuk oleh adanya kekuatan yang bersemayam pada diri manusia, yakni iman, cipta, rasa dan karsa, yang membentuk pandangan hidup perorangan yang kemudian beradaptasi dengan pandangan hidup perorangan lainnya menjadi pandangan hidup kelompok. Hubungan antara kehidupan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya melahirkan suatu pandangan hidup bangsa. Wahjono, memberikan arti pandangan hidup ini sebagai “prinsip” atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seorang itu hidup? (Wahjono,1991:25).

Dapatlah dikatakan bahwa pandangan hidup bangsa adalah suatu komitmen nasional yang dipegang teguh oleh seluruh komponen bangsa dalam bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam arti manusia Indonesia memandang diri dan lingkungan di sekitarnya yang merupakan bagian dari kehidupannya. Maka tepatlah Pancasila menjadi model perilaku manusia Indonesia di tengah pluralisme bangsa Indonesia. Keanekaragaman dipandang sebagai komponen yang mempunyai kekuatan yang maha dasyat dalam bersikap dan bertindak laku untuk memecahkan persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa.

Marsudi, (2004:6) mengatakan bahwa sebagai pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan di dalam segala bidang. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun maupun norma hukum yang berlaku. Bagi suatu bangsa yang ingin hidup kokoh, pandangan hidup ini sangat diperlukan guna mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, karena tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Maka dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak kehidupan masyarakat yang makin maju serta di dalam pembangunan dirinya.

2. Pancasila di Tengah Indahnya Keanekaragaman

a. Potret Indonesia dan Pancasila

Secara alamiah-kodrati tanah Indonesia secara geografis terdiri ribuan pulau dan ratusan ribu kilometer garis pantai serta terletak di posisi silang antara dua benua dan dua samudera memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memiliki keanekaragaman dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan seperti ras/etnik, agama, bahasa, kultur, sosial, ekonomi dan lain-lain yang tersebar di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau-Pulau besar seperti: pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian, Bali, Sulawesi dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Timur, Flores, Lembata, Lombok, dan sebagainya. Dari ribuan pulau ini kalau dilihat secara cermat potensi yang dimiliki tidak sama, ada pulau yang kaya dengan potensi alam dan ada pulau yang potensi alamnya terbatas.

Kondisi geografis yang demikian akan membutuhkan pengawasan yang ketat demi keutuhan bangsa dan negara. Di samping pengawasan yang ketat dari posisi keamanan juga di sisi lain potensi yang beranekaragam ini mendorong para pengambil kebijakan (pemerintah) untuk lebih arif mengelola sumber daya alam yang ada, serta pembangunan yang merata secara nasional sehingga tidak terjadi kepincangan antara pusat dan daerah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian sehingga isu-isu sosial yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa seperti kesenjangan sosial ekonomi, disintegrasi bangsa dihindari. Karena menurut penulis kalau hal ini tidak diperhatikan maka pemicu sosial, disintegrasi bangsa berpeluang besar. Misalnya Irian Jaya potensi alam mencukupi untuk kebutuhan di Provinsi ini, tetapi perjalanan sejarah membuktikan bahwa ada kesenjangan yang tajam antara pusat dan daerah. Pembangunan diorientasikan pada pusat ibukota yang kalau dicermati maka akan menimbulkan kecemburuan yang tinggi bagi pulau atau propinsi yang sumber daya alam sangat mencukupi untuk kehidupan di Propinsi ini, maka akibat lebih lanjut akan berdampak pada penurunan nasionalisme dalam kebhinekaan.

Keberagaman budaya Indonesia menjadi ciri yang melandasi terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari lima agama besar yaitu Islam, Hindu, Buda, Katholik, Kongfutsu dan aliran kepercayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Pembauran dalam keberbedaan baik agama, suku, ras, bahasa, adat istiadat saling berinteraksi. Dalam perjalanan sejarah bangsa culture asli dan filsafat Hindu, Budha, Islam, Kristen berkolaborasi dan kristalisasi tumbulah peradaban luhur bangsa yang walaupun beranekaragam suku bangsa, adat istiadat dan agama tetapi satu. Satu dalam cara pandang melihat keberbedaan maka tumbulah semangat solidaritas dan rasa kesetiakawanan karena cita-cita dan tujuan bersama yang memancarkan sinar sakti persatuan dalam panji ideologi Pancasila. Krishna, (2005:111) menyatakan kita harus

memberdayakan diri supaya imunitas kita makin baik. Dan, memberdayakan diri berarti menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap diri. Kembali pada jati diri bangsa. Kembali pada budaya asal, budaya leluhur. Kita menghormati budaya India, budaya Arab, budaya Cina, budaya barat dan budaya-budaya lain. Kita juga siap belajar dari mereka untuk "memperkaya budaya sendiri". Pada saat yang sama, kita juga siap menolak apa saja yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Budaya bangsa perlu dilestarikan, dengan demikian dimensi keberagaman akan menjadi medan pembelajaran untuk saling mengisi maka akan tumbuh perilaku saling harga menghargai di antara berbagai etnik bangsa yang bermuara pada tumbuhnya demokratisasi bangsa. Demokratisasi bangsa menjadi sarana penyaluran aspirasi bangsa sehingga tidak timbul ego di antara suku bangsa besar dan suku bangsa kecil. Dengan demikian konsep puncak kebudayaan nasional di mana kebudayaan nasional adalah akar dari kebudayaan daerah, akan berpeluang sikap ego dari kebudayaan daerah tertentu yang mencapai puncak kebudayaan nasional dan berdampak lebih lanjut pada penyamarataan budaya hal ini tidak cocok lagi dengan kebhinekaan yang dianut oleh bangsa Indonesia serta pengkerdilan budaya milik etnis minoritas.

Sebaliknya, Abdulgani (2002:10) mengatakan perlu kita sadari bahwa masih ada faktor yang menjadi pula sumber sebabnya. Yaitu faktor manusia. Manusia Indonesia dengan segala ke-anekaragaman di bidang kepercayaan, keagamaan, pandangan politiknya, sumber dan etikanya juga dengan berbagai macam kebhinekaan sumber hidupnya, kondisi sosial dan bahasanya, tapi yang semua ke-anekaragaman serta ke-*bhinekaan* terikat dalam "*tunggal-Ika*"nya solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa oleh Pancasila kita; manusia-manusia Indonesia itu sendiri ikut menentukan proses perkembangan Bangsa, Tanah-Air dan Negara kita dewasa ini.

Kebhinekaan Indonesia perlu mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia dalam Ideologi Pancasila. Era globalisasi telah mengoncangkan seluruh sendi kehidupan manusia Indonesia, untuk itu pemahaman dan penghayatan Ideologi Pancasila perlu ditanamkan dalam hati sanubari bangsa, sebagai penangkal pemicu kestabilan nasional. (Abdulgani, dalam lembaga Informasi nasional, 2002:1). Jiwa nasionalisme adalah sumber energi. Energi mental spiritual, energi ilmiah-rasional dan energi badan-jasmaniah. Tanpa energi maka bangsa akan lemah. Dan mudah dijajah bangsa lain. Seperti halnya dengan nasib bangsa kita dalam beberapa abad yang lalu. Fahaman dan jiwa kebangsaan kita dewasa ini sedang menghadapi era globalisasi, dengan segala macam problematikanya. Kita

perlu memantapkan jiwa nasionalisme itu. Memantapkan mengandung juga arti mereaktualisasi. Yaitu menyadari kembali sumber sejarahnya, dan menghidup-hidupkan kembali serta menghayati kembali segala nilai-nilai aslinya, untuk kita jadikan sumber inspirasi serta pengangan arah tujuan bagi masa kini dan masa depan.

b. Pancasila Sebagai Perekat Bangsa ditengah indahnya keanekaragaman

Pancasila sebagai filosofi bangsa mempunyai peran sebagai roh dan jiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari peradaban bangsa Indonesia sehingga tidak beralasan untuk mengantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Peradaban bangsa mengalami proses kristalisasi yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah. Sejarah telah membuktikan pada masa kejayaan Sriwijaya dan Mojopahit peradaban bangsa sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa tetangga kita. Nusantara ini dipersatukan oleh Mojopahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal Gadjah Mada dalam sumpah Pala Gadjah Maja. Untuk itu tidak ada salahnya kita berkaca pada pengalaman sejarah Sriwijaya dan Mojopahit. Untuk itu setiap komponen bangsa dituntut komitmen untuk saling menghargai, solidaritas, persatuan mendapat tempat pada hati sanubari bangsa Indonesia sebagai penangkal biang pemicu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebhinekaan dipandang sebagai roh/spirit yang mempunyai kekuatan yang maha dyasat untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Dengan demikian Pancasila yang diyakini sebagai ideologi bangsa menjadi landasan pijak untuk kita berkaca di tengah peradaban bangsa yang beranekaragam untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila tidak hanya ditanamkan secara kognitif, dalam arti bahwa nilai pancasila disajikan dalam bentuk materi dalam pelajaran khusus, seperti pendidikan Pancasila. Nilai-nilai tersebut juga bisa diaplikasikan dalam mata pelajaran lainnya secara efektif, misalnya dengan membiasakan disiplin, jujur, saling menghargai, menghormati dan lain-lain. Pengamalan dari nilai-nilai Pancasilaapun sesungguhnya cukup muda dilakukan oleh generasi muda yaitu dengan cara mengembangkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda, maupun tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain, membantu teman yang kena musibah sesuai kemampuan, menghargai produk dalam negeri, melakukan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong-royong dan lain sebagainya (Sunarso, dkk:2008).

Sulit untuk dibantah bahwa Pancasila dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup yang berkembang di tanah tumpah darah kita. Manusia Indonesia rata-rata mengenalnya di sudut manapun mereka berada pada bumi Nusantara walaupun dengan sudut penghayatan yang berbeda dan wujud pengalaman yang berlainan sesuai dengan kondisi alami dan keadaan zaman (tingkat kemajuan berpikir) masing-masing. Penghayatan nilai-nilai Pancasila, membantu manusia untuk menilai, untuk meninjau secara tepat sikapnya terhadap dirinya sendiri serta terhadap dunia di luar dirinya, untuk membuat pilihan dengan kebebasan yang semakin mantap. Sebab kebebasan (*freedom*) bukanlah fungsi dari ada tidaknya kesempatan untuk memilih (mengenai apa saja) tetapi ditentukan oleh ada tidaknya kemampuan orang itu untuk menetap sendiri tujuannya, untuk memilih sendiri jalan dan cara mencapai tujuan, untuk mengambil sendiri keputusan diantara alternatif yang mampu dipikirkannya.

Pancasila adalah hasil galian dari khazanah budaya bangsa Indonesia sehingga Kebhinekaan Indonesia menjadi ciri yang mewarnai keberagaman suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang tersebar di Indonesia. Disisi lain secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau baik pulau kecil dan pulau besar serta laut sebagai pemersatu atau penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lain. (Robert Sibarani, JKB. 2004.Vol.1;41) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki beraneka ragam etnik, budaya, dan agama.

Harus disadari bahwa kemajemukan etnik, budaya dan agama itu bukanlah sesuatu yang muncul belakangan ini atau sengaja diciptakan kemudian, tetapi kemajemukan itu sejak dahulu telah ada, jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemajemukan itu telah turut memberikan sumbangan terhadap pembentukan bangsa ini. Bahkan munculnya istilah integrasi didasarkan pada pandangan bahwa bangsa ini berasal dari keanekaragaman. Oleh karena itu, tidak beralasan jika ada usaha untuk “melenyapkan” atau “menghapuskan” kemajemukan itu, baik dengan cara penyeragaman dan penghapusan kemajemukan sama halnya dengan usaha mengingkari kenyataan dan usaha menciptakan disintegrasi bangsa. Sekali lagi, istilah kemajemukan atau pluralisme ada dalam terminologi kita karena bangsa ini terdiri atas beranekaragam etnik, budaya dan agama.

Potensi keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semestinya dipandang sebagai kekuatan yang maha dasyat, hal ini terpancar dalam ideologi Pancasila untuk memacuh pertumbuhan peradaban di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila dalam keanekaragaman menjadi ciri peradaban masyarakat Indonesia untuk itu masyarakat Indonesia perlu dijiwai oleh semangat saling penghargaan dan pemahaman di antara keberagaman. Keberagaman harus diterima sebagai sesuatu yang kodrati untuk memancarkan sinar persatuan untuk menangkalkan konflik karena cita-cita dan tujuan bersama. Agar terealisasi tujuan tersebut Koentjaraningrat (1990:103) menyatakan dalam hubungan sosial dengan orang lain, perlu sekali tercipta keharmonisan yang dapat direalisasikan lewat korelasi-korelasi, gotong-royong, solidaritas, musyawarah serta saling pengertian yang mendalam. Hal-hal tersebut merupakan ciri khas kepribadian manusia Indonesia. Dengan solidaritas yang kuat, yang tidak terbatas lingkungan tertentu, seperti keluarga inti, suku sendiri melainkan menjangkau masyarakat luas dari berbagai ras, suku, golongan dan kebudayaan, maka keharmonisan dan ketenteraman dapat direalisasi. Peranan sosial justru merupakan sarana yang mempersatukan manusia Indonesia yang kini terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya.

Kristalisasi dari kebhinekaan tersebut lahirlah Pancasila yang menjadi landasan filosofis bangsa Indonesia. Marsudi, (2003:43) Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembang bangsa Indonesia. Prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Keanekaragaman budaya, adat, istiadat, bahasa dan agama menjadi ciri yang mewarnai kehidupan sosial budaya dan politik yang melahirkan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu potensi keanekaragaman perlu mendapat perhatian dari semua komponen bangsa dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal-hal yang disebutkan di atas adalah modal pengikat seluruh komponen bangsa ini, kalau diabaikan maka akan berpeluang besar terganggunya stabilitas nasional Indonesia dan berdampak lebih lanjut pada disintegrasi bangsa.

Pengalaman sejarah telah membuktikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti masalah sosial politik yang terjadi di Indonesia oleh orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab sebagai biang pemicu terganggunya stabilitas nasional. Seperti isu SARA dari orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa yang

terjadi di replubik ini antara lain masalah: pemboman rumah-rumah ibadat, pemboman beberapa tempat di Indonesia seperti bom Bali I dan bom Bali II, pemboman di Poso, masalah Aceh, Irian, yang sampai sekarang belum tuntas secara nasional. Jadi boleh dikatakan bahwa kerapuhan nasionalisme sebagai akibat dari keangkuhan dari etnis dan golongan tertentu yang menganggap bahwa merekalah yang paling berjasa di Replubik ini, kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tajam antara yang kaya dan miskin, pembangunan yang lebih berpusat pada kota-kota metropolitan sehingga dari sisi pertumbuhan pembangunan terdapat jurang yang sangat tajam antara pusat dan daerah (Jurnal Antropologi Indonesia, 2004:1)

Mengawali Milenium ketiga bukanlah merupakan hal yang ringan bagi seluruh bangsa Indonesia setelah mengalami disintegrasi bangsa dan krisis multidimensional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai daya perlu diupayakan dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk perbaikan dan penyempurnaan tatanan kehidupan masyarakat. Bertolak dari pengalaman yang pahit dan getir dari apa yang dialami berbagai komunitas lokal dan kelompok masyarakat, disadari perlunya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengangkat harkat dan martaba segenap insan Indonesia. Untuk itu pengenalan dan pemahaman yang seksama tentang berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan budaya lokal merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Terutama dalam era menyongsong otonomi daerah yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Perlu kiranya disadari bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang kondisi, potensi, ataupun kendala yang dihadapi berbagai kelompok masyarakat. serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal itu sendiri, dikawatirkan bahwa pola penetapan kebijakan dalam mengatasi berbagai kemelut dan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak akan mengalami perubahan mendasar. Implikasi negatif yang justru dapat membawa kehidupan masyarakat setempat kejurang kehancuran lebih dalam, akan kembali berulang.

Pada era sekarang Pancasila kurang dibicarakan lagi dan kebinekaan sudah disalahartikan yang kuat menendes yang lemah, yang kaya menekan yang miskin, yang berkuasa menganggap diri paling hebat untuk menekan yang kecil mumpung masih punya jabatan sehingga tidak mengherankan suburnya korupsi di Indonesia terdapat pada kalangan pejabat yang merasa diri paling miskin sehingga harus mengeruk lagi uang rakyat, keroposnya penegak hukum yang bisa disogok dengan uang yang

menyebabkan wibawa hukum di Indonesia sangat menyedihkan. Hukum di Indonesia tidak berpihak kepada masyarakat kecil tetapi menjadi alat pejabat dan yang punya duit.

Seiring dengan keprihatian yang dialami bangsa ini maka perlu berbagai upaya untuk menggali berbagai informasi dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam menggali kebudayaan dan kehidupan masyarakat lokal, serta berbagai masalah yang dihadapi dalam era Ore Baru selama lebih dari tiga dasa warsa terakhir. Bertolak dari berbagai temuan yang telah ada kiranya dikaji secara saksama hal-hal yang potensial berkenaan dengan tatanan kehidupan masyarakat Lokal, berbagai dimensi kebudayaan setempat, kendala yang dihadapi, serta hal-hal yang perlu digali dalam kegiatan-kegiatan penelitian serta pendampingan tahap selanjutnya. Hasil-hasil temuan dan kajian ini tentulah akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu antropologi dan ilmu-ilmu terkait, serta berbagai pihak yang akan menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Terutama bagi para pengambil kebijakan ditingkat daerah, di tingkat nasional, maupun para lembaga donor internasional (Jurnal Antropologi Indonesia, 2000:3).

D. Penutup

Bangsa Indonesai dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang luar biasa cepat dan sangat dinamis. Perkembangan yang sangat cepat tersebut harus disikapi dan direspon dengan kecepatan kita beradaptasi serta mereformasi diri secara kultur, yakni memunculkan kembali Pancasila serta nilai-nilai unggul keIndonesiaan yang diharapkan menjadi benteng moral kultur menghadapi serbuan globalisasi yang terkadang bergerak seperti arus liar, dapat kembali mengkokoh kuatkan "*Persatuan Indonesia*". Ketunggal Ikaan dalam Kebhinekaan adalah modal untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tentunya tidak bisa ditawar-tawar Pancasila sebagai perekat bangsa, demi terwujudnya cita-cita bangsa maka masyarakat Indonesia dituntut sikap solidaritas, kesetiakawanan, toleransi, gotong-royong di antara heterogenitas bangsa untuk memandang kebhinekaan merupakan bagian dari dirinya. Dengan demikian demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, NKRI Harga Mati

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Antropologi Indonesia. 2000. *Mengawali Abad Ke-21 : Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Intergrasi Bangsa*.

- Krishna Anand. 2005. *Indonesia Jaya*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Marsudi Al Subandi.H 2003. *Pancasila dan UUD' 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasionalisme, Reformasi dan Gotong-Royong. 2002. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional.
- Murdiona dkk. 1991. *Panacasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP 7 Pusat.
- Sunarso, Ismail, 2008. *Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia*. Jakartta: Bina Aksara.